



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NIKODEMUS SIGIT RAHARDJO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH
3. NHK : 427190

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.100.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , Rp. 1.100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	390.000.000
1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.739.126
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.369.850.670
F. HARTA LAINNYA	Rp.	650.000.000
Sub Total	Rp.	3.545.589.796

III. HUTANG **Rp.** **118.152.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **3.427.437.796**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI RAHMANTO
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MADYA
3. NHK : 767076

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/150 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 336.500.000

1. MOTOR, HONDA MEGAPRO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA CRUISE HYBRID TWO TONE Tahun
2024, HASIL SENDIRI Rp. 314.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 83.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 59.984.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.649.484.000

III. HUTANG Rp. 1.385.818.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 263.666.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FIKRY MUHAMMAD ACHYAR
2. Jabatan : PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR/PENGAWAS KEUANGAN NEGARA
MAHIR
3. NHK : 475269

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.150.000.000

1. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 85.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/45 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 97.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT RODA 2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 155.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 86.993.281

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.488.993.281

III. HUTANG Rp. 835.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 653.993.281

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUSTINUS BENNI INDRIANTO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PIUTANG NEGARA KPKNL SEMARANG
3. NHK : 267987

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 82.600.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 37.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.225.100.000

III. HUTANG Rp. 450.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.775.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDAH MURNIATI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN**
3. NHK : **428094**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.053.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/134 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 677.000.000
2. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. Tanah Seluas 139 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 926.000.000
5. Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 129.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **385.200.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000
2. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU GRANDMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.438.300.000
III. HUTANG	Rp.	634.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.804.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRIYANTO NUGROHO
2. Jabatan : PEJABAT ADMINISTRATOR
3. NHK : 112349

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.300.000.000**

1. Tanah Seluas 365 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **371.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOBIL, SUZUKI WAGON R Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **25.900.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **600.000.000**



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.065.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.362.400.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.362.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWIYANTO SINUNG WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 276720

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA
YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 205.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 170.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 320.757.054

F. HARTA LAINNYA Rp. 73.263.597

Sub Total Rp. 1.890.520.651

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.890.520.651

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDAH MURNIATI**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN**
3. NHK : **428094**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.053.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/134 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 677.000.000
2. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. Tanah Seluas 139 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 926.000.000
5. Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 129.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **385.200.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000
2. MOBIL, HYUNDAI CRETA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU GRANDMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.438.300.000
III. HUTANG	Rp.	634.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.804.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG FEBRI WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
3. NHK : 826111

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	30.000.000
1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.104.393
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	836.104.393
III. HUTANG	Rp.	618.146.574
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	217.957.819

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Haryanto
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3. NHK : 463852

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.465.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/138 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 930.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 990.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 243.000.000**

1. MOTOR, Honda Astrea Supra X 125 FI Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, Vespa LXV 150 3vi Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOBIL, NISSAN X-TRAIL Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOTOR, HONDA NEW VARIO 2017 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO FINO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 93.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	481.340.931
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.282.840.931
III. HUTANG	Rp.	313.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.969.840.931

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOHANES KRISTIAN TO RAHARDJO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA I
3. NHK : 211963

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	730.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 730.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	250.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	987.500.000

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **987.500.000**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASDJAYA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA II
3. NHK : 797020

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **755.625.000**

1. Tanah Seluas 1.735 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 130.125.000
2. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 82.500.000
3. Tanah Seluas 1.380 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 103.500.000
4. Tanah Seluas 1.340 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 100.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1.130 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 339.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **504.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOTOR, YAMAHA R 15 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000



5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
34.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.010.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.319.135.000

III. HUTANG Rp. 250.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.069.135.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI SUYANTO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA III
3. NHK : 427579

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 756.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/120 m2 di KAB / KOTA PATI,
HASIL SENDIRI Rp. 756.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 138.240.000

1. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
108.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
3.600.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
5.940.000
4. MOTOR, YAMAHA GEAR Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
20.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.100.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.330.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 905.670.000

III. HUTANG Rp. 828.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 77.670.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERY AGUNG WIBOWO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENILAIAN I**
3. NHK : **988667**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **319.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 924 m2/80 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, Rp. 184.800.000
2. Tanah Seluas 1.465 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, Rp. 65.000.000
3. Tanah Seluas 1.518 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI , Rp. 70.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **147.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **77.900.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **96.138.932**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 640.838.932

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 640.838.932

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ETIK SETYAWATI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENILAIAN II**
3. NHK : **459898**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.208.795.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 480.795.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/29 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 217 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 523.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 299.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI NINJA SS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MX KING Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



6. MOTOR, SUZUKI SATRIA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 623.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 150.000.000

Sub Total Rp. 2.283.095.000

III. HUTANG Rp. 507.286.833

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.775.808.167

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNTUR SUMITRO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PIUTANG NEGARA
3. NHK : 144075

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.180.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/60 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	253.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, HRV MOBIL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	115.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.558.700.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.558.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM SUPAAT
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PIUTANG NEGARA I
3. NHK : 765737

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.920.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/80 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/86 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 127.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO TYPE E Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO / BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 52.369.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.139.869.000

III. HUTANG Rp. 2.700.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.137.168.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUSTINUS BENNI INDRIANTO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PIUTANG NEGARA KPKNL SEMARANG
3. NHK : 267987

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **105.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **82.600.000**

D. SURAT BERTAGIH **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **37.500.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.225.100.000**

III. HUTANG **Rp.** **450.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.775.100.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SATRIOTOMO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG LELANG
3. NHK : 427176

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/90 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, SUZUKI NEX SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HADIAH Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.150.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.210.862.067

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.016.012.067

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.016.012.067



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANNA KAMILASARI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI BIMBINGAN LELANG I
3. NHK : 111897

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **691.250.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 283 m2/72 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 495.250.000
2. Tanah Seluas 196 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 196.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **350.230.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.650.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.650.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS/MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.600.000
6. MOTOR, YAMAHA YAMAHA 2PV R M/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.900.000
7. MOBIL, SUZUKI AKN415G (4X2) AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 163.000.000



8. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 27.930.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	86.480.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	300.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	462.075.986
F. HARTA LAINNYA	Rp.	150.000.000
Sub Total	Rp.	2.040.035.986

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.040.035.986

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R. ADI PENGAYOMAN
2. Jabatan : KEPALA DIVISI UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
3. NHK : 799031

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 805.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/28 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
2. Tanah Seluas 2.302 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 430.000.000

1. MOTOR, PIAGGIO SCOTER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 463.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 237.812.386

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.936.412.386

III. HUTANG Rp. 52.590.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.883.822.386

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI WARSIYATI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI
3. NHK : 431209

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **685.257.000**

1. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA ,
HASIL SENDIRI Rp. 238.425.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 446.832.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **302.360.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MNIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
2. MOBIL, VW SAFARI MINIBUS Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 12.000.000
4. MOBIL, VW SAFARI MINIBUS Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
5. MOBIL, VOLKSWAGEN SAFARI Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp.
67.500.000
6. MOTOR, KAWASAKI BJ175A Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
22.860.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **146.295.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **22.050.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.167.150.733**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.323.112.733

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.323.112.733

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPIYANTA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL
3. NHK : 112378

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 530.000.000

1. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/45 m2 di KAB / KOTA
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 68.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU AYL A 1.0 X MT Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 64.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. 40.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.068.231.859

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.706.231.859

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.706.231.859

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETYO BUDI PRAMONO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI HUKUM
3. NHK : 137428

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/80 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 177.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G LUXURY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 AT SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 249.529.500

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 928.029.500

III. HUTANG Rp. 44.254.460

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 883.775.040

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOKO SURONO
2. Jabatan : KEPALA SEKSI INFORMASI
3. NHK : 765665

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah Seluas 960 m2 di KAB / KOTA TUBAN, Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	500.200.000
III. HUTANG	Rp.	500.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	0

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.